



Program 'Nglarisi' Ikut Terdampak

YOGYA (KR) - Program 'Nglarisi' yang menjadi bagian Gandeng Gendong ikut terdampak mewabahnya virus Korona. Terutama setelah berbagai agenda pertemuan OPD di lingkungan Pemkot Yogya yang berkurang atau ditiadakan guna menjalankan protokol pencegahan penularan Covid-19.

Dengan adanya pengurangan atau pembatalan kegiatan pertemuan baik rapat, pelatihan, deseminasi, FGD dan lain sebagainya, maka anggaran jamuan makan minum otomatis harus dialihkan. "Ada instruksi dari pusat untuk realokasi anggaran untuk menangani Covid-19. Salah satunya anggaran jamuan makan minum di setiap pertemuan. Beberapa OPD sudah mengalihkannya," jelas Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kota

Yogya Wahyu Handoyo, Jumat (17/4).

Total anggaran jamuan makan minum pertemuan di lingkungan OPD Kota Yogya tergolong cukup besar. Tahun ini totalnya mencapai sekitar Rp 40 miliar. Anggaran jamuan makan minum itu pun diarahkan untuk memesan pada kelompok masyarakat yang masuk dalam peserta 'Nglarisi'. Dengan begitu perputaran anggaran dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat yang sebagian anggotanya berasal dari keluarga tidak mampu.

Wahyu mengatakan, dalam dua bulan pertama yakni Januari dan Februari, serapan anggaran jamuan makan minum melalui 'Nglarisi' cukup tinggi. Pada Januari tercatat Rp 668 juta, dan Februari melonjak dua kali lipat menjadi Rp 1,36 miliar. Sedangkan pada

Maret hingga pertengahan bulan serapannya juga sudah mencapai Rp 1,15 miliar. "Sejak pertengahan Maret begitu ada kebijakan pembatasan sosial, hampir tidak ada lagi pertemuan yang melibatkan banyak orang. Bahkan setiap rapat kini tidak bertemu muka melainkan melalui teleconference," imbuhnya.

Oleh karena itu, sejak pertengahan Maret dipastikan serapan anggaran melalui 'Nglarisi' merosot tajam. Akan tetapi akumulasi serapannya baru bisa terdokumentasikan pada bulan depan. Begitu pula pada April, besar kemungkinan tidak ada transaksi jamuan makan minum melalui 'Nglarisi'. Kondisi tersebut diperkirakan akan berlangsung hingga Juni seiring kebijakan pembatasan sosial di lingkungan kerja. (Dhi)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Pengendalian Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005